

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit Eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN sendiri memiliki 17 Kantor Wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah DJKN Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dari 2 bulan, maka akan disimpulkan beberapa intisari dari pembahasan pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur sebagai berikut :

- a) SIMAK-BMN merupakan subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manjerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Materi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi digunakan oleh para staf atau karyawan yang dalam ruang lingkupnya bertanggungjawab sebagai bagian atau satuan kerja atau seksi perlengkapan/rumah tangga untuk menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan

kementrian negara/lembaga. SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian SIMAK-BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus.

- b) Pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur terdapat enam bidang yang memiliki tugas masing-masing untuk menggerakkan kinerja pada Kanwil DJKN Jawa Timur, salah satunya adalah Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN). Bidang ini lah yang menangani pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN Tingkat Wilayah serta bertugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan BMN dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah. Bidang PKN mempresentasikan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang berwenang sebagai manajer aset.
- c) Dokumen pendukung berupa bukti-bukti transaksi, surat serah terima BMN sebagai bukti-bukti kepemilikan dari pihak-pihak bersangkutan merupakan perangkat yang sangat penting dan harus dikelola dengan baik agar dikemudian hari bisa dipergunakan kembali sebagai alat bukti yang sah.

- d) Kegiatan rekonsiliasi, pencatatan dan pengelolaan yang dilakukan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur dalam mencatat Barang Milik Negara berupa aset tetap sudah tepat dan benar sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PKM.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
- e) Hasil keluaran dari penggunaan aplikasi ini yaitu sebagai pertanggungjawaban pengguna kuasa Barang Milik Negara kepada pemerintahan atau unit akuntansi di atasnya, hasilnya dapat berupa Laporan Barang, Buku Barang, Jurnal Barang, Posisi Barang Milik Negara di Neraca dan berbagai kartu kontrol yang diperlukan

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran untuk pelaksana pembuat laporan pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara yaitu bidang Pengelola Kekayaan Negara (PKN) dalam melaksanakan prosedur pencatatan melalui SIMAK-BMN agar tidak terjadi kesalahan dan akhirnya akan memberikan laporan keuangan dan laporan penggunaan BMN secara riil dan absolut adalah agar dokumen pendukung berupa bukti-bukti transaksi, surat serah terima BMN dan bukti kepemilikan dari pihak-pihak bersangkutan merupakan perangkat yang sangat

penting dan harus dikelola dengan baik, dapat dikelompokkan pada suatu file atau dokumen yang tertata rapi dan bersih sesuai jenis BMN atau dikategorikan pada suatu kelompok sehingga sewaktu-waktu akan meninjau kembali nilai penyusutan atau akan diserahkan kembali pada pihak ketiga tidak repot lagi mencari pada semua file atau dokumen yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bathiar dan Muchlis. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.
- Arif, Nur Muhammad. 2012. *Barang Milik Negara (BMN) Untuk Pemula*.
Nganjuk : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk.
- Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. 2012. *Modul Aplikasi SIMAK-BMN* .
Surabaya : Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.
- Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. 2012. *Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)*. Surabaya : Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.
- Departemen Keuangan. 2008. *Petunjuk Operasional Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)*. Jakarta : Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan .
- Diana, A. dan Setiawati, Lilis. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Andi.
- Haryadi. 2013. “Analisi Penatausahaan Aset Tetap Dan Penerapannya Melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pada Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Tridianti.
- Kementerian Keuangan Negara. 2010. *Modul Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)*. Jakarta : Kementerian Keuangan Negara.

Krisnawati, Wiwin. 2013. Tinjauan Atas Perolehan Dan Penyusutan Aset Tteap Pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I". Skripsi Diploma tak diterbitkan, Universitas Widyatama.

Martani, Dwi., Wardhani, Ratna, et al. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta : Salemba Empat.

Reeve M. J., Warren, S. C., et al.2012. Pengantar Akuntansi : Adaptasi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

STIE Perbanas Surabaya. 2012. *Modul Akuntansi Pengantar I*. Surabaya : STIE Perbanas Surabaya.